

HUBUNGAN GOVERNMENT SIZE DENGAN KESEJAHTERAAN DI INDONESIA: Peran Moderasi Bonus Demografi

Reny Maselati Margaretha¹, Khoirunurrofik²

^{1,2} Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Indonesia

Correspondent author: renymargaretha83@gmail.com

Jakarta, 10430, Indonesia

Abstract

People's welfare is one of the important goals in the RPJMN 2020-2045 and the Golden Indonesia Vision 2045. One of the government's roles in realizing welfare is through fiscal policy in the form of government spending, which is assessed by the ratio of government spending to GDP or government size. This study aims to determine the relationship between government size and welfare, especially the role of demographic dividend in moderating the relationship between government size and welfare using panel data of 34 provinces in Indonesia in 2012-2021 and the Fixed Effect Model (FEM). The results show that an increase in government size reduces GRDP per capita, but the existence of a demographic dividend through a low dependency ratio is able to reduce the negative relationship of non-optimal government spending on GRDP per capita. As for poverty, government size is able to reduce poverty, but the presence of the demographic dividend has not been able to play a role in increasing government spending that is more efficient and targeted for the purpose of poverty alleviation. Furthermore, the diversity of regression results obtained based on Indonesia's sub-regions indicates that there are still inequalities in budget planning, the quantity and quality of human resources especially productive age population, and the availability of jobs.

Keywords: *demographic dividend; dependency ratio; government size; government spending; welfare*

Abstrak

Indonesia Emas 2045. Salah satu peran pemerintah dalam mewujudkannya adalah melalui kebijakan fiskal berupa belanja pemerintah yang dinilai dari rasio pengeluaran pemerintah dengan PDB atau *government size*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan *government size* terhadap kesejahteraan, khususnya peran bonus demografi dalam memoderasi hubungan antara *government size* terhadap kesejahteraan dengan menggunakan data panel 34 provinsi di Indonesia Tahun 2012-2021 dan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan *government size* menurunkan PDRB per kapita, namun dengan adanya bonus demografi melalui rasio ketergantungan rendah mampu mengurangi hubungan negatif belanja pemerintah yang tidak optimal tersebut terhadap PDRB per kapita. Sedangkan terhadap kemiskinan, *government size* mampu menurunkan kemiskinan, akan tetapi kehadiran bonus demografi justru belum mampu berperan dalam meningkatkan belanja pemerintah yang efisien dan tepat sasaran bagi tujuan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, keberagaman hasil regresi yang diperoleh berdasarkan sub wilayah Indonesia mengindikasikan masih terdapat ketidakmerataan dalam perencanaan anggaran, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia khususnya penduduk usia produktif, serta ketersediaan lapangan pekerjaan.

Kata Kunci: *belanja pemerintah; bonus demografi; government size; rasio ketergantungan; kesejahteraan*

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2045 merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, yang juga menjadi dasar dalam penetapan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Adapun beberapa hal yang ingin dicapai adalah peningkatan terhadap penyediaan infrastruktur, layanan publik, sumber daya manusia yang berkualitas serta kesejahteraan rakyat. RPJMN ini juga telah merujuk kepada target-target yang ada di dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai bagian dalam 7 agenda pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masih menjadi tantangan dalam pembangunan di Indonesia, terutama kemiskinan struktural masih terjadi dimana rendahnya akses yang dimiliki masyarakat akan sumber daya akibat sistem sosial, budaya dan politik yang mengakibatkan masyarakat sulit keluar dari kemiskinan sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

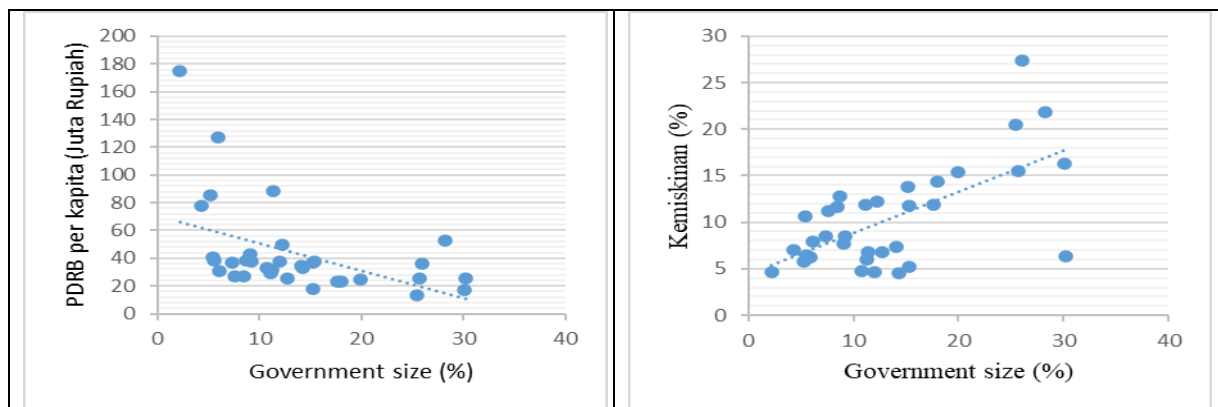
Kesejahteraan masyarakat menunjukkan kemakmuran yang diperoleh oleh penduduk suatu negara akibat dari pembangunan yang terjadi di suatu negara dimana mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan yang ada. Pertumbuhan yang diharapkan terjadi adalah ketika pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga mengurangi tingkat kemiskinan, atau peningkatan pendapatan masyarakat miskin lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan yang terjadi yang dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang *pro poor/ pro-poor growth* (Ravallion, 2004).

Government size merupakan rasio pengeluaran pemerintah dengan Produk Domestik Bruto/ PDB (Kim, et al., 2018; Santika dan Qibthiyah, 2020). Beberapa hasil penelitian menunjukkan *government size* umumnya berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita atau akan berdampak positif bagi PDRB per kapita hingga mencapai titik optimal tertentu dan kemudian akan menjadi negatif setelah titik optimal tersebut (Colombier, 2009; Asimakopoulous & Karavias, 2016; Kim et al., 2018; Santika dan Qibthiyah, 2020) berpengaruh negatif (Landau, 1983; Miller dan Russek, 1990; Olaoye et al., 2020) atau tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan (Agell et al., 2006). Sedangkan menurut Udayana et al. (2022) hubungan negatif namun tidak signifikan antara *government size* dan pertumbuhan di Provinsi Maluku antara lain disebabkan oleh tingginya rasio belanja pegawai terhadap total belanja pemerintah dibandingkan rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah yang mengurangi *multiplier effect* yang diperoleh karena belanja pegawai relatif tidak berpengaruh untuk memberi nilai tambah dalam perekonomian.

Selain itu, *government size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Iradian, G., 2005). Dalam penelitian Anderson et al. (2018), pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan tidak menemukan bukti yang kuat bahwa pengeluaran pemerintah mampu mengurangi kemiskinan yang ada. Untuk pengeluaran/ belanja

pemerintah berdasarkan fungsinya, ditemukan bahwa pengeluaran pada pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan bagi pengurangan kemiskinan, namun pengeluaran perlindungan sosial tidak signifikan berdampak bagi kemiskinan. (Taruno, H. T., 2019).

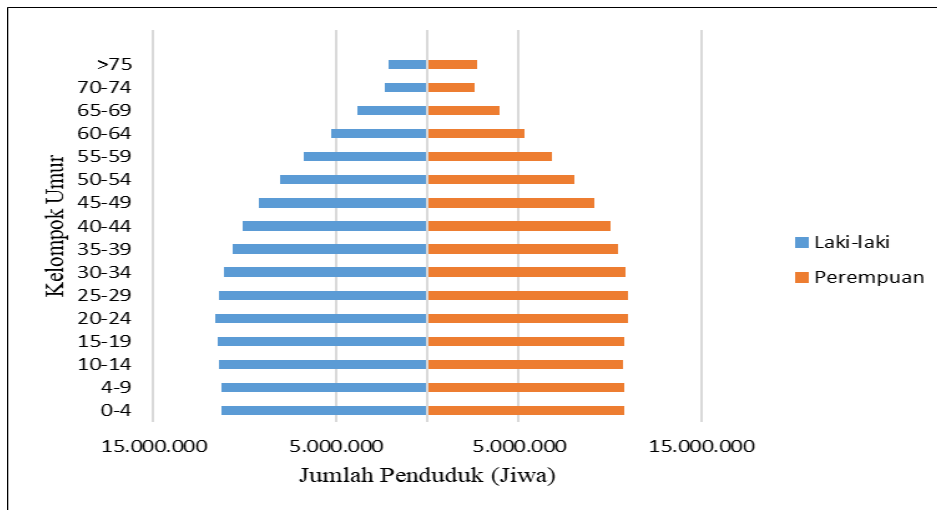
Kesejahteraan berkaitan erat dengan pendapatan (PDB per kapita) dan kemiskinan. Peran pemerintah dalam pengelolaan anggaran dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya dengan *government size*. Gambar 1 menunjukkan terdapat hubungan negatif antara rata-rata *government size* provinsi di Indonesia Tahun 2012-2021 dengan PDRB per kapita di tahun 2021, yang mengindikasikan peningkatan pengeluaran pemerintah justru menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan terhadap kemiskinan, kenaikan *government size* mampu meningkatkan persentase jumlah penduduk miskin. Hal ini menjadi salah satu fokus penelitian dalam mengkaji lebih lanjut terkait hubungan *government size* dan kesejahteraan.



Gambar 1. Hubungan *government size* terhadap pertumbuhan dan kemiskinan pemerintah daerah Tahun 2012-2021 (Sumber : Badan Pusat Statitik, diolah 2023)

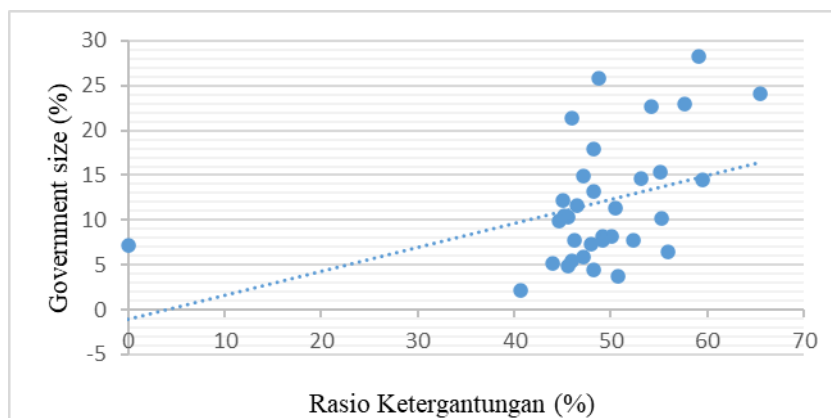
Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana faktor penduduk berperan dalam hubungan *government size* terhadap kesejahteraan. Berdasarkan hasil *interrupted time series analysis* tidak terdapat dampak bonus demografi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama 2014-2021. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan, dimana tidak terdapat perbaikan tren penurunan tingkat kemiskinan selama bonus demografi (Sujoko, Arif, 2022). Ketika sumber daya manusia yang berlimpah tidak didukung ketrampilan, pelatihan dan pendidikan yang memadai maka justru menjadi "Beban Demografi" yaitu meningkatkan pengangguran, kriminalitas, kemiskinan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi (Mustafa, Nur, 2022). Gambar 2 menunjukkan pada tahun 2021 jumlah penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia non produktif. Berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, jumlah populasi terbesar adalah berada pada rentang umur 15-34 tahun. Namun hal ini tidak didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, dimana tingginya angka pengangguran justru berada pada rentang

umur tersebut (Gambar 2), mengakibatkan penurunan pendapatan, menghambat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kemiskinan. Penurunan terhadap pasokan tenaga kerja akan memperlambat pertumbuhan (Facchini et al., 2017).



Gambar 2. Populasi Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023)

Perubahan demografi juga dapat memengaruhi pengeluaran/belanja sosial pemerintah secara signifikan. Dalam penelitiannya, Rifa'i A. (2019) menemukan bahwa usia produktif berhubungan negatif dan signifikan terhadap belanja sosial. Dengan kata lain, semakin tinggi jumlah usia produktif maka belanja sosial yang dialokasikan oleh pemerintah semakin kecil. Hal ini sejalan dengan hasil *scatter plot* pada gambar di bawah ini yang menunjukkan terdapat hubungan positif antara rasio ketergantungan dengan *government size*. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka akan meningkatkan belanja pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat melalui belanja kesehatan, pendidikan, dana pensiun dan lainnya.



Gambar 3. Hubungan rasio ketergantungan terhadap *government size* daerah Tahun 2012-2021 (Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa kesejahteraan di Indonesia masih menjadi tujuan utama pemerintah yang salah satunya dapat dicapai dengan *government*

size. Demografi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap belanja pemerintah terutama dengan transisi demografi yang terjadi saat ini. Untuk itu, pertanyaan pada penelitian adalah apakah *government size* berpengaruh terhadap kesejahteraan, khususnya apakah bonus demografi yang terjadi saat ini melalui rasio ketergantungan yang rendah dapat dijadikan peluang untuk memoderasi (memperkuat atau memperlemah) dampak *government size* terhadap PDRB per kapita serta kemiskinan akibat dari pengeluaran pemerintah yang menjadi lebih optimal, efisien serta tepat sasaran.

Review Kosseptual

PDRB per kapita dan Kemiskinan

PDRB per kapita merupakan pembagian antara suatu daerah dengan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, yang menggambarkan pendapatan rata-rata yang dimiliki setiap orang dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya pada tahun tersebut. PDRB merupakan hasil dari pertumbuhan PDRB yang terjadi. Beberapa teori pertumbuhan yang terakit dalam penelitian ini adalah teori pertumbuhan baru (*New Growth Theory*) atau teori pertumbuhan endogen yang dipelopori oleh Romer (1986) menyatakan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan penduduk. Teori ini menjadikan faktor penduduk sebagai faktor *endogeneous* mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi dari dalam dan selalu mengalami perubahan/ dinamis karena pengetahuan, inovasi, dan teknologi (Adioetomo, S. M., 2005). Selain itu, Jones (2001) menyatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi adalah proporsional terhadap ukuran penduduk, dimana melalui pengaruhnya pada fertilitas maka angka pertumbuhan penduduk dan perubahan kebijakan politik, permintaan terhadap anak serta persepsi terhadap kepuasan merupakan determinan angka pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Selanjutnya, di dalam kemiskinan secara umum dapat dinyatakan sebagai suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya standar hidup secara layak. Akan tetapi, seiring perkembangannya maka kemiskinan bukan hanya terkait kekurangan *basic need* (pangan, sandang, papan) melainkan juga *basic right* (hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, hak untuk pekerjaan yang layak, hak atas tanah bagi para petani, dan sebagainya). Kemiskinan itu sendiri akan terus berada pada satu lingkaran setan kemiskinan yang tidak putus (*vicious circle of poverty*). Hal ini diungkapkan oleh Ragnar Nurkse (1953) dimana kemiskinan yang terjadi pada suatu generasi akan menciptakan kemiskinan di generasi selanjutnya atau "*A poor country is poor because its poor*". Ketidaksempurnaan pasar dan keterbekalangan akan menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah mengakibatkan pendapatan yang diterima menjadi rendah juga. Hal ini berimbas pada

rendahnya tabungan yang dimiliki dan investasi yang dilakukan yang akan mengakibatkan ketertinggalan/ keterbelakangan dan seterusnya.

Government size

Teori pengeluaran publik yang dikemukakan oleh Samuelson (1986) mengungkapkan bahwa keberadaan barang publik dengan karakteristik non-exclusionary dan non-rivalry tidak menjamin perekonomian yang ada tidak dapat mencapai kondisi Pareto Optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Kondisi perekonomian yang terjadi akan menyebabkan keuntungan di salah satu pihak dan kerugian di pihak lainnya. Untuk itu, keterbatasan sumber daya yang dimiliki suatu negara harus mampu digunakan seefisien mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pihak secara bersama-sama.

Pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk infrastruktur dan pembentukan modal manusia dapat meningkatkan produktivitas serta kinerja perekonomian. Pengeluaran pemerintah juga dapat ditujukan guna peningkatan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan yang ada. Pemberian fasilitas bagi dunia usaha melalui pengeluaran pemerintah juga dapat menarik minat investor untuk meningkatkan pembangunan suatu negara.

Bonus Demografi

Perubahan demografi atau transisi demografi merupakan perubahan kependudukan yang terjadi akibat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk yang ada di suatu negara, yang memengaruhi jumlah pertumbuhan penduduk dan struktur umur penduduk. Transisi demografi dalam jangka panjang akan memberikan tenaga kerja yang tinggi dan dapat meningkatkan total output, akumulasi kekayaan yang lebih besar jika tabungan yang dimiliki oleh masyarakat dapat diinvestasikan untuk kegiatan yang menghasilkan/produktif serta modal manusia yang melimpah apabila terdapat kebijakan khusus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Adioetomo, S. M., 2005).

Salah satu bentuk transisi demografi yaitu ketika penduduk yang ada di negara tersebut memiliki populasi usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia non produktif atau yang dikenal dengan bonus demografi. Terdapat dua tahap bonus demografi yaitu bonus demografi pertama dan bonus demografi kedua. Bonus demografi pertama adalah ketika usia produktif yang lebih banyak tersebut berada pada rentang usia muda sedangkan ketika yang produktif berada pada rentang usia tua maka disebut bonus demografi kedua. Penelitian ini akan membahas bonus demografi pertama dan dampaknya bagi pertumbuhan dan kemiskinan.

Menurut Bank Dunia (2016), di dalam tipologi bonus demografi terdapat dua indikator yang digunakan sebagai klasifikasi bonus demografi yaitu pertumbuhan persentase penduduk usia produktif periode 2015-2030 dan angka fertilitas total (*Total Fertility Rate/ TFR*) pada 1985 dan 2015. TFR merupakan rata-rata banyak anak yang dimiliki oleh seorang

perempuan di akhir masa reproduksinya. Untuk pertumbuhan persentase penduduk usia produktif dikelompokkan menjadi dua yaitu, negatif atau nol dan positif. Sedangkan TFR dibagi ke dalam empat kelompok yaitu lebih kecil dari 2,1 anak per perempuan pada 1985, lebih besar atau sama dengan 2,1 pada 1985, lebih kecil dari 4 pada 2015 dan lebih besar atau sama dengan 4 pada tahun 2015.

Oleh karena itu, tipologi bonus demografi dibagi ke dalam empat klasifikasi yaitu:

1. Pascabonus demografi, apabila pertumbuhan penduduk usia produktif negatif atau nol serta TFR lebih kecil dari 2,1 pada tahun 1985.
2. Akhir bonus demografi, apabila pertumbuhan penduduk usia produktif negatif atau nol serta TFR lebih besar atau sama dengan 2,1 pada tahun 1985.
3. Awal bonus demografi, apabila pertumbuhan penduduk usia produktif positif serta TFR lebih kecil dari empat pada tahun 2015.
4. Prabonus demografi, apabila pertumbuhan penduduk usia produktif positif serta TFR empat atau lebih kecil pada tahun 2015.

Penelitian ini hanya menggunakan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebagai proksi bonus demografi yang menunjukkan rasio/perbandingan antara jumlah penduduk tidak produktif/ bukan merupakan usia kerja dengan jumlah penduduk usia produktif. Semakin rendah rasio ketergantungan maka semakin kecil jumlah penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh usia produktif. Ketika bonus demografi terjadi dan disertai dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, maka bonus demografi dipercaya dapat memberikan dampak positif yaitu berupa peningkatan ekonomi dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) serta terbukanya pasokan tenaga kerja yang melimpah sehingga dapat menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan kriteria pekerja yang diinginkan

METODE

Penelitian menggunakan data panel *unbalance* tahun 2012-2021 pada 34 provinsi di Indonesia *fixed effect model* (FEM) dengan *fixed effect model* (FEM) untuk mengetahui hubungan *government size* terhadap pertumbuhan dan kemiskinan, dimana model penelitian:

$$\text{Hipotesis 1 : } PDRB_{it} = \alpha + \beta_1 UP_{it} + \beta_2 ED_{it} + \beta_3 PMA_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$Pov_{it} = \alpha + \gamma_1 UP_{it} + \gamma_2 ED_{it} + \gamma_3 PMA_{it} + \gamma_4 TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Kemudian dilakukan analisis regresi moderasi/ *Moderating Regression Analysis* untuk mengetahui peran moderasi bonus demografi dalam hubungan *government size* terhadap pertumbuhan dan kemiskinan melalui interaksi antara *government size* dan rasio ketergantungan (UPRK), dengan model penelitian:

$$\text{Hipotesis 2 : } PDRB_{it} = \alpha + \beta_1 UP_{it} + \beta_2 RK_{it} + \beta_3 UP_{it}RK_{it} + \beta_4 ED_{it} + \beta_5 PMA_{it} + \beta_6 TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$Pov_{it} = \alpha + \gamma_1 UP_{it} + \gamma_2 RK_{it} + \gamma_3 UP_{it}RK_{it} + \gamma_4 ED_{it} + \gamma_5 PMA_{it} + \gamma_6 TPT_{it} + \epsilon_{it}$$

Untuk regresi terhadap PDRB akan menggunakan model log-lin sedangkan terhadap kemiskinan akan menggunakan model lin-lin.

Tabel 1. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian

No.	Variabel (Label)	Definisi	Sumber Data	Satuan
1.	PDRB per kapita (LogPDRB)	PDRB provinsi dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di provinsi tersebut	BPS	Juta rupiah
2.	Kemiskinan (Pov)	Jumlah penduduk miskin	BPS	Persentase
3.	Government size (UP)	Realisasi belanja pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota dalam satu provinsi) terhadap PDRB harga berlaku	DJPK Kementerian Keuangan dan BPS	Persentase
4.	Rasio ketergantungan (RK)	Perbandingan penduduk usia non produktif terhadap usia produktif, $RK = \frac{P(0-4)+P(>65)}{P(15-64)} \times 100$	Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Bappenas, BPS dan <i>United Nations Population Fund</i> (2013)	Persentase
5.	Share ekonomi digital (ED)	Rasio PDRB lapangan usaha informasi dan komunikasi terhadap total PDRB menurut harga konstan 2010	BPS	Persentase
6.	Penanaman Modal Asing (LogPMA)	Penanaman modal untuk melakukan usaha baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.	BPS	Juta US\$
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	BPS	Persentase

Sumber: data diolah, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melakukan 2 (dua) regresi dalam menganalisa hubungan *government size* terhadap pertumbuhan dan kemiskinan dan regresi antara variabel moderasi rasio ketergantungan terhadap hubungan *government size* dan variabel dependen (pertumbuhan dan kemiskinan).

Tabel 2. Hasil Estimasi dengan Variabel Dependen PDRB per kapita

VARIABEL	LogPDRB	LogPDRB	LogPDRB	LogPDRB
UP	-0.0129*** (0.00401)	-0.00834** (0.00337)	-0.00949*** (0.00316)	-0.0109*** (0.00309)
ED		0.0996*** (0.00861)	0.0972*** (0.00808)	0.104*** (0.00803)
logPMA			0.0452*** (0.00690)	0.0447*** (0.00671)

TPT				-0.0221*** (0.00516)
Constant	3.668*** (0.0549)	3.170*** (0.0629)	2.941*** (0.0685)	3.048*** (0.0712)
R-squared	0.033	0.329	0.413	0.447
Adj R-squared	-0,08	0,252	0,343	0,378
Number of id	34	34	34	34
Observations	339	339	339	339

Standard errors in parentheses : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabel 3. Hasil Estimasi dengan Variabel Dependen PDRB per kapita

VARIABEL	Pov	Pov	Pov	Pov
UP	-0.0859** (0.0387)	-0.110*** (0.0373)	-0.0990*** (0.0360)	-0.0715** (0.0332)
ED		-0.510*** (0.0953)	-0.525*** (0.0919)	-0.662*** (0.0861)
logPMA			-0.0677 (0.0784)	-0.0583 (0.0719)
TPT				0.422*** (0.0553)
Constant	12.29*** (0.529)	14.84*** (0.696)	15.18*** (0.779)	13.12*** (0.763)
R-squared	0.016	0.101	0.113	0.257
Adj R-squared	-0.09	-0.003	0,008	0,166
Number of id	34	34	34	34
Observations	340	340	339	339

Standard errors in parentheses : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabel 4. Hasil Estimasi dengan Variabel Moderasi Rasio Ketergantungan

VARIABEL	LogPDRB	Pov
UP	-0.0211*** (0.00749)	-0.610*** (0.0716)
RK	-0.0422*** (0.00465)	0.266*** (0.0444)
UPRK	0.000253* (0.000148)	0.0110*** (0.00141)
ED	0.0769*** (0.00758)	-0.365*** (0.0725)
logPMA	0.0305*** (0.00606)	0.108* (0.0579)
TPT	-0.0213*** (0.00462)	0.325*** (0.0441)
Constant	5.267*** (0.249)	-1.805 (2.380)
R-squared	0.579	0.550
Adj R-squared	0.578	0.492
Number of id	34	34
Observations	339	339

Standard errors in parentheses : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabel 5. Hasil Estimasi dengan *Dummy* Variabel Moderasi Rasio Ketergantungan

VARIABEL	LogPDRB	Pov
UP	-0.0216*** (0.00693)	-0.559*** (0.0796)
RK (1= rendah, 0 = tinggi)	-0.0412*** (0.00692)	0.217*** (0.0795)
UPRK	0.000537*** (0.000176)	0.0106*** (0.00202)
ED	0.0857*** (0.00745)	-0.366*** (0.0856)
logPMA	0.0371*** (0.00885)	-0.0510 (0.102)
TPT	-0.0233*** (0.00550)	0.367*** (0.0632)
Constant	4.967*** (0.285)	1.178 (3.269)
R-squared	0.591	0.516
Adj R-squared	0.516	0.428
Number of id	21	21
Observations	169	169

Standard errors in parentheses : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Pengujian tambahan dilakukan untuk melihat dampak hubungan variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Tengah dan wilayah Indonesia Timur.

Tabel 6. Hasil Estimasi Menurut Wilayah

VARIABEL	LogPDRB	Pov	LogPDRB	Pov	LogPDRB	Pov
UP	0.128*** (0.0396)	-0.556 (0.461)	-0.0323*** (0.00919)	-0.455*** (0.0773)	0.0810** (0.0337)	-0.757* (0.406)
RK Barat	-0.0228*** (0.00743)	0.338*** (0.0867)				
UPRK Barat	-0.00246*** (0.000752)	0.00937 (0.00878)				
RK Tengah			-0.0823*** (0.0122)	0.0806 (0.103)		
UPRK Tengah			2.68e-05 (0.000206)	0.0115*** (0.00173)		
RK Timur					-0.0175 (0.0188)	0.347 (0.226)
UPRK Timur					-0.00145** (0.000625)	0.0124 (0.00752)
Variabel kontrol	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Constant	4.282*** (0.384)	-5.105 (4.477)	7.933*** (0.715)	3.965 (6.013)	5.031*** (1.093)	4.001 (13.16)
R-squared	0.746	0.514	0.636	0.655	0.765	0.809
Adj R-squared	0.709	0.442	0.575	0.597	0.694	0.752
Number of id	18	18	12	12	4	4
Observations	180	180	119	119	40	40

Standard errors in parentheses : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Catatan : variabel kontrol yang digunakan adalah share ekonomi digital, PMA dan TPT

Pembahasan

Berdasarkan uji empiris Tabel 2 - Tabel 5, kenaikan *government size* berdampak signifikan pada penurunan PDRB per kapita dan kemiskinan. Hubungan negatif *government size* dan PDRB per kapita disebabkan beberapa faktor seperti pengeluaran pemerintah yang tidak efisien, biaya penetapan peraturan yang tinggi, regulasi yang belum jelas, kebijakan moneter dan fiskal yang berdampak pada insentif ekonomi sehingga produktivitas menurun serta besarnya utang yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran pemerintah tersebut (Landau, 1983; Miller dan Russek, 1990; Alfonso et al., 2005; Olaoye et al., 2020). Rasio belanja pegawai terhadap total belanja pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah menjadi penyebab hubungan negatif *government size* dan pertumbuhan di Provinsi Maluku (Udayana et al., 2022). Selain itu, penelitian lainnya juga menemukan bahwa ketika *government size* telah mencapai titik optimal maka pengaruh *government size* terhadap pertumbuhan ekonomi akan menjadi negatif atau berbentuk U terbalik yang dikenal dengan kurva Armey (Armey, 1995; Kim et al., 2018; Asimakopoulous & Karavias, 2016). Artinya penggunaan sumber daya terlalu tinggi di dalam perekonomian justru akan menurunkan produktivitas marginal dari sumber daya tersebut dan akibatnya peningkatan *government size* justru menurunkan pertumbuhan ekonomi (Santika dan Qibthiyah, 2020). Selain itu, juga terdapat ketidakefisienan belanja pemerintah pada belanja yang dinilai tidak mendesak/ perlu dilakukan serta tidak memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian.

Permasalahan belanja yang belum optimal dalam meningkatkan PDRB per kapita di Indonesia salah satunya disebabkan ketidakefisienan belanja pemerintah. Tidak sedikit belanja pemerintah yang dinilai tidak mendesak atau perlu dilakukan serta tidak memberikan nilai tambah yang besar dan mampu meningkatkan perekonomian. Hal ini perlu diminimalisir sehingga tidak terjadi pemborosan belanja dan dapat lebih tepat sasaran sehingga mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Perencanaan yang matang dalam penyusunan anggaran hingga pelaksanaan belanja sangat penting agar efisiensi belanja dapat tercapai. Pengalokasian input yang tepat, peningkatan kapasitas fiskal di masing-masing provinsi dengan strategi yang tepat dapat menjadi peluang untuk meningkatkan output yang efisien (Rambe, R., 2020). Terhadap kemiskinan, belanja pemerintah melalui berbagai bantuan sosial cukup efektif bagi penurunan persentase jumlah masyarakat miskin seperti bantuan pendidikan, penyediaan layanan kesehatan BPJS, serta Program Beras Sejahtera (Rastra) membantu masyarakat miskin dalam mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses mereka terhadap terpenuhinya kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasar masyarakat.

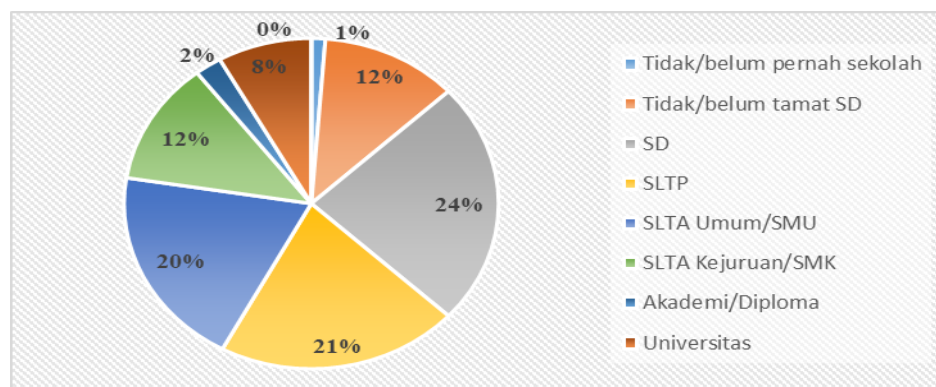
Untuk rasio ketergantungan, berhubungan negatif terhadap PDRB per kapita dan berhubungan positif terhadap kemiskinan. Perubahan demografis dengan peningkatan usia produktif dibandingkan usia muda dan lansia (rasio ketergantungan rendah) yang saat ini terjadi di Indonesia dapat memberikan bonus demografi yang diharapkan yaitu berupa peningkatan PDRB per kapita dan penurunan tingkat kemiskinan. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif dapat meningkatkan pertumbuhan maupun penurunan kemiskinan (Birdsall & Sinding, 2001; Lee, Mason dan Miller, 2003; Samosir, O. dan Rajagukguk, W., 2017 serta Cruz, M. dan Ahmed, A., 2018). Tabel 2.4 menunjukkan provinsi dengan rasio ketergantungan rendah akan menyebabkan pertumbuhan lebih baik sebesar 0,04 poin dibandingkan provinsi dengan rasio ketergantungan tinggi. Sejalan dengan itu, provinsi dengan rasio ketergantungan rendah akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.22 poin lebih baik dibandingkan provinsi dengan rasio ketergantungan tinggi.

Rasio ketergantungan yang lebih tinggi atau bonus demografi yang lebih rendah akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan menjadi lebih lambat. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh oleh usia produktif digunakan untuk mencukupi kebutuhan penduduk usia muda dan lansia (non produktif) yang akhirnya akan berdampak pada penurunan tabungan serta investasi. Sedangkan ketika rasio ketergantungan rendah disertai dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan pendapatan yang layak, maka dapat meningkatkan tabungan dan mendorong investasi pada sumber daya manusia tersebut (Adioetomo, 2004). Bonus demografi ketika dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi jendela peluang bagi pertumbuhan ekonomi melalui tabungan dan investasi (Lee et al. 1997; Bloom and Williamson 1998; Mason, 2003; Pool et al. 2006; Pool 2007). Sedangkan bonus demografi yang disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, memperluas pasar tenaga kerja yang ada, mengelola dengan baik pertumbuhan populasi yang terjadi serta memperbaiki kesehatan penduduk akan mampu menurunkan kemiskinan (Setiawan, 2019; Kurniawan, 2022).

Bonus demografi tidak dapat terjadi secara langsung namun memerlukan kebijakan ekonomi dan sosial agar para pekerja usia produktif tersebut mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menstimulus perekonomian daerah. Perubahan-perubahan demografi yang terjadi akan menciptakan upaya bersama dalam menyediakan pekerjaan yang layak dan perlindungan sosial yang tepat sasaran, meningkatkan perekonomian dinamis dan melindungi lingkungan, menjamin pembiayaan pembangunan yang memadai, mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan, menghadapi krisis, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan dasar dan menengah, memberdayakan perempuan dan penduduk muda serta melindungi hak-hak penduduk usia lanjut (Samosir, O. B., 2023).

Kebijakan lainnya yang perlu ditingkatkan adalah upaya pemerintah dalam investasi sumber daya manusia khususnya penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif yang bekerja memang mampu meningkatkan PDRB per kapita, namun apabila tidak didukung dengan kualitas yang memadai khususnya pendidikan maka hal ini dapat menyumbang kemiskinan seperti pada Gambar 5 dimana pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh penduduk usia di atas 15 tahun adalah pada tingkat SD dan SLTP. Akibatnya, terdapat keterbatasan dalam inovasi, kreativitas, kemampuan menguasai teknologi yang ada sehingga pekerjaan yang ditawarkan kepada penduduk usia produktif sebagian besar adalah sebagai buruh/tenaga kerja kasar dengan upah rendah atau memilih untuk mengurus rumah tangga bagi kaum perempuan. Hal ini sejalan dengan identifikasi penyebab kemiskinan antara lain adanya perbedaan kualitas angkatan kerja, tingginya pertumbuhan penduduk serta kurangnya penguasaan teknologi (Sharp et al. 2000).

Rendahnya pendapatan yang diterima oleh penduduk usia produktif akan menurunkan tabungan dan investasi, meningkatkan belanja bantuan sosial pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan bagi usia muda serta bantuan kesehatan dan kesejahteraan hari tua bagi usia lansia. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja usia produktif tersebut, maka pemerintah memberikan bantuan berupa Program Kartu Pra Kerja. Program ini diberikan oleh pemerintah kepada penduduk usia 18 tahun ke atas yang tidak sedang dalam pendidikan formal maupun pekerja yang terkena pemutusan kerja untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan vokasi sehingga memiliki daya saing yang lebih baik. Karena, ketika suatu negara mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta membangun dengan lebih baik maka pada tahun 2030 bonus demografi akan mengurangi jumlah penduduk miskin (Ahmed dan Cruz, 2016). Selain itu, kualitas SDM yang sehat, terdidik, produktif dan berinvestasi dapat menyumbang bonus demografi kedua saat pertumbuhan penduduk usia lanjut mengalami peningkatan (Samosir, O. B., 2019).



Gambar 4. Pendidikan yang Ditamatkan oleh Penduduk Usia >15 Tahun pada Tahun 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 2023

Peningkatan pembangunan di Papua melalui infrastruktur dan sumber daya manusia serta penunjukan Papua sebagai tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 mampu menggerakkan roda perekonomian daerah tersebut. Peningkatan jumlah tenaga kerja, lapangan usaha dan investasi yang meningkat sejak dari perencanaan Tahun 2016 hingga pelaksanaan PON telah memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan yang terjadi di wilayah Indonesia Timur seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai yang terletak di Provinsi Maluku Utara, pembangunan dan pengembangan sarana transportasi (jalan, pelabuhan, terminal, dermaga penyeberangan), percepatan penguatan konektivitas, pengembangan pariwisata serta peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dan sosial budaya untuk mencegah konflik mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah yang efisien dan tepat sasaran berdampak bagi penurunan masyarakat miskin di wilayah Indonesia Timur. Keberagaman hasil berdasarkan wilayah menunjukkan masih terdapat ketidakmampuan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan anggaran dengan tepat, tersedianya lapangan pekerjaan, serta kuantitas dan kualitas SDM usia produktif yang tidak merata di Indonesia.

Selanjutnya, variabel kontrol menunjukkan bahwa ekonomi digital berdampak positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita serta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kenaikan lapangan usaha pada sektor informasi dan komunikasi mampu meningkatkan PDRB per kapita dan menurunkan kemiskinan. Dalam teori yang dikembangkan oleh Todaro (2006) perubahan struktur ekonomi dari pangsa pasar primer atau pertanian bergerak ke pasar sekunder dan tersier akan sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. McMillan dan Rodrik (2011) menyatakan negara yang mampu keluar dari kemiskinan adalah ketika mampu melakukan diversifikasi dari sektor pertanian serta produk tradisional lainnya ke sektor modern. Karena produktivitas secara keseluruhan akan meningkat akibat perpindahan tenaga kerja dan sumber daya lain ke sektor yang lebih modern maka pendapatan meningkat.

Untuk variabel investasi melalui PMA pada pengujian pertama, kedua dan kategorikal *dummy* menunjukkan arah hubungan positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Olaoye et al., 2020 dimana *Foreign Direct Investment* berhubungan positif namun tidak signifikan terhadap PDB per kapita. Sedangkan terhadap kemiskinan, pada pengujian pertama dan kategorikal *dummy* ditemukan bahwa PMA berpengaruh negatif namun tidak signifikan sedangkan pada pengujian kedua ditemukan PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Investasi yang dilakukan lebih berdampak terhadap PDRB per kapita karena investasi terbesar dilakukan pada sektor listrik, gas dan air serta pertambangan bukan terhadap tanaman pangan, perkebunan dan peternakan maupun industri-industri kecil yang lebih

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinannya. Sedangkan untuk tingkat pengangguran, diperoleh pada setiap pengujian pengangguran akan menurunkan PDRB per kapita dan meningkatkan kemiskinan di masyarakat dengan pengaruh yang signifikan pada level 1%. Hal ini bersesuaian dengan Hukum Okun (Mankiw, 2019) pertumbuhan ekonomi dan pengangguran mempunyai hubungan negatif dimana semakin tinggi tingkat pengangguran akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah yang akan meningkatkan kemiskinan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa meningkatnya *share* ekonomi digital dan penanaman modal asing akan memberikan akses bagi tersedianya lapangan usaha serta lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Begitu juga dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah akan meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ini secara menyeluruh akan menyokong peningkatan PDRB per kapita dan penurunan jumlah penduduk miskin. Perubahan demografi yang terjadi mampu mengurangi dampak negatif antara *government size* dengan kesejahteraan jika usia produktif tersebut bekerja dan memiliki kualitas pendidikan yang baik sehingga mampu meningkatkan tabungan, investasi dan daya saing yang dimiliki. Akibatnya pemerintah akan fokus kepada belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran khususnya bagi peningkatan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Karena pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional seperti infrastruktur, investasi modal manusia dan perlindungan sosial (Mankiw, 2019).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kenaikan *government size* dapat menyebabkan penurunan PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan. Faktor-faktor seperti efisiensi belanja pemerintah, bonus demografi, dan rasio ketergantungan memiliki peran penting dalam memoderasi hubungan antara *government size* dengan PDRB per kapita dan kemiskinan. Provinsi dengan rasio ketergantungan rendah cenderung memiliki dampak positif terhadap PDRB per kapita dan penurunan kemiskinan, sementara rasio ketergantungan yang tinggi memperlemah hubungan negatif antara *government size* dengan PDRB per kapita. Selain itu, terdapat perbedaan hasil antar wilayah di Indonesia, di mana kenaikan *government size* memiliki dampak yang berbeda terhadap PDRB per kapita dan kemiskinan tergantung pada kondisi ekonomi dan demografi setempat.

Rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan dampak *government size* terhadap PDRB per kapita dan pengentasan kemiskinan antara lain:

1. Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi belanja dengan regulasi yang jelas dan sederhana, serta meningkatkan kapasitas fiskal di daerah untuk mengurangi

ketergantungan terhadap utang.

2. Diperlukan peningkatan belanja yang lebih berdampak dengan memberikan multiplier effect bagi provinsi tersebut, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
3. Bonus demografi perlu didukung dengan peningkatan investasi sumber daya manusia, seperti peningkatan lapangan pekerjaan, investasi sektor informasi dan komunikasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan keterampilan dan pelatihan untuk mencegah "Beban Demografi".

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperhitungkan pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan pada satuan kerja di daerah, serta menggunakan jeda waktu (lagged time) untuk melihat dampak dari belanja pemerintah terhadap PDRB per kapita dan kemiskinan. Selain itu, penelitian dapat mempertimbangkan penggunaan regresi dengan persamaan kuadrat untuk melihat hubungan tidak linier antara government size dengan pertumbuhan ekonomi, serta menambahkan Total Fertility Rate (TFR) sebagai salah satu komponen dalam mengukur bonus demografi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S. M. (2004). Age Structural Transitions and its Implication The case of Indonesia over a Century, 1950-2050. *Seminar on 'Age Structural Transitions: Demographic Bonuses, But Emerging Challenges for Population and Sustainable Development*. Paris: CICRED.
- Adioetomo, S. M. (2005). Bonus Demografi: Menjelaskan Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan*.
- Ahmed, S. A., Cruz, M., Go, D. S., Maliszewska, M., & Osorio-Rodarte, I. (2014). How Significant is Africa's Demographic Dividend for its Future Growth and Poverty Reduction? *World Bank Policy Research Working Paper, WPS7134*
- Ahmed, S. A., & Cruz, M. (2016). Making the Most of Demographic Change in Southern Africa. *Making the Most of Demographic Change in Southern Africa, August*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7798>
- Anderson, E., d'Orey, M. A. J., Duvendack, M., & Esposito, L. (2018). Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-regression Analysis. *World Development, 103*, 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.006>
- Armev, R. (1995). *The freedom revolution*. Regnery.
- Asimakopoulou, S., & Karavias, Y. (2016). The impact of government size on economic growth: A threshold analysis. *Economics Letters, 139*, 65–68. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2015.12.010>
- Birdsall, N., & Sinding, S. W. (2001). How and why population matters: New findings, new issues. In N. Birdsall, A. C. Kelley, & S. W. Sinding (Eds.), *Population matters: Demographic change, economic growth, and poverty in the developing world* (pp. 3-23). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0199244073.003.0001>.
- Bloom, D. E., & Williamson, J. G. (1998). Demographic transitions and economic miracles in emerging Asia. *World Bank Economic Review, 12*, 419–456.
- Colombier, C. (2009). Growth effects of fiscal policies: an application of robust modified M-estimator. *Applied Economics, Taylor & Francis Journals, 41*(7), 899-912.
- Cruz, M., & Ahmed, S. A. (2018). On the impact of demographic change on economic growth and poverty. *World Development, 105*, 95–106. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.12.018>

- Damanpour, F. (1991). Organizational innovation : A meta-analysis of effect of determinants and moderators. *Academy of Management Journal*, 34(3). <https://doi.org/10.2307/256406>
- Facchini, F., Melki, M., & Pickering, A. (2017). Labour Costs and the Size of Government. In *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* (Vol. 79, Issue 2). <https://doi.org/10.1111/obes.12140>
- Iradian, G. (2005). Inequality, Poverty, and Growth: Cross-Country Evidence. *IMF Working Papers*, 05(28), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451860474.001>
- Jain, M., Nagpal, A., & Jain, A. (2021). Government size and Economic Growth: An Empirical Examination of Selected Emerging Economies. *South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance*, 10(1), 7–39. <https://doi.org/10.1177/2277978720979889>
- Kim, D. H., Wu, Y. C., & Lin, S. C. (2018). Heterogeneity in the effects of government size and governance on economic growth. *Economic Modelling*, 68(October 2016), 205–216. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.07.014>
- Kurniawan, K., & Roberto, R. E. (2022). Keterkaitan bonus demografi dan kemiskinan di Kalimantan Utara. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(2), 248–256. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i2.11060>
- Landau, D. (1983). Government expenditure and economic growth: a cross-country study. *Southern Economic Journal*. 49(3). 783-792
- Lee, R. D., Mason, A., & Miller, T. (2003). Saving, Wealth, and Population. In *Population Matters* (Issue January). <https://doi.org/10.1093/0199244073.003.0006>
- Mankiw, Gregory, N. (2008). Makroekonomi. Edisi Keenam
- Mankiw, Gregory, N. (2018). *Macroeconomics*. 10th edition. New York : Worth Publishers.
- Mason, A. (2001). Population Change and Economic Development in East Asia. Challenges Met, Opportunities Seized. Stanford, California: Stanford University Press
- Mason, A. (2003). Population change and economic development: what we have learned from the East Asia experience. *Applied Population and Policy*, 1(1)
- Miller, S. M. & Russek, F. S. (1990). Co-Integration and error-correction models: the temporal causality between government taxes and spending. *Southern Economic Journal*, 57(1), 221-229
- Musgrave. (1980). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga.
- Nurkse, Ragnar. (1953) *Problems of capital fomation in underdeveloped countries*. New York : Oxford University Press.
- Olaoye, O. O., Eluwole, O. O., Ayesha, A., & Afolabi, O. O. (2020). Government spending and economic growth in ECOWAS: An asymmetric analysis. *The Journal of Economic Asymmetries*, 22, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.jeca.2020.e00180>
- Othman, N., Yusop, Z., Andaman, G., & Mansor, M. (2018). Impact of government spending on FDI inflows: The case of ASEAN-5, China and India. *International Journal of Business and Society*, 19(2), 401–414.
- Patrick Flavin, A. C. P. and B. R. (2014). *Assessing the Impact of the Size and Scope of Government on Human Well-Being Author (s): Patrick Flavin , Alexander C . Pacek and Benjamin Radcliff Published by: Oxford University Press Stable URL : https://www.jstor.org/stable/43287568 Assessing the I. 92(4), 1241–1258.*
- Pool, I. (2007). Demographic dividends: determinants of development or merely windows of opportunity? *Ageing Horizons*, 7, 28–35.
- Pool, I., Wong, I. R., & Vilquin, E. (Eds.). (2006). *Age structural transition: Challenges for development*. Paris: CICRED.
- Rambe, R. (2020). Inefisiensi Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia: Pendekatan DEA dan Regresi Logit. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(4), 311 - 324. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.175>
- Ravallion, M.(2004). Pro-poor growth: A primer. Working paper, *World Bank Policy Research* 3242-2004

- Saez, Emmanuel. (2022). Understanding The Social State. Diakses dari <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/03/Understanding-the-social-state-Saez>
- Samosir, O., & Rajagukguk, W. (2017). Demographic and Competitiveness Acceleration and Government Sustainable Advantage in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 113–118.
- Samosir, O. B. (2023). *Demografi sebagai ilmu untuk kesejahteraan umat manusia*. <https://feb.ui.ac.id/2019/06/14/omas-bulan-samosir-tipologi-bonus-demografi/>
- Samosir, O. B. (2023). Demografi sebagai ilmu untuk kesejahteraan umat manusia. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan*. Universitas Indonesia.
- Samuelson, Paul A., dan Nordhaus, William (2001). *Macro Economis*, Edisi Terjemahan, Edisi 14. Jakarta : Erlangga.
- Santika, A. R., & Qibthiyah, R. M. (2020). *Government size dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 212–230. <https://doi.org/10.21002/jepi.v20i2.975>
- Setiawan, S. A. (2019). Mengoptimalkan Bonus Demografi Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2). <https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.34>
- Siregar, O. K. (2022). *Kebijakan Fiskal Dan Fertilitas Di Indonesia*. CV. Pena Persada.
- Suryawati, C. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*.
- Sujoko, Aris. (2022). Bonus Demografi, Penduduk Menua, dan Kemiskinan Lansia. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-6021260/bonus-demografi-penduduk-menua-dan-kemiskinan-lansia>
- Taruno, H. T. (2019). Public Spending and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Economic Growth and Public Spending on Poverty Reduction in Indonesia 2009-2018. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 4 (2), 49-56.
- Todaro, M.P., dan Stephen, C. Smith. (2006). *Pembangunan ekonomi* (edisi kesembilan, jilid I), Jakarta : Erlangga.
- Udayana, K. A., Hidayat, A. S., & Yuniati, S. A. (2022). Relevansi Skala Optimum Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Financial Distress Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(1), 71–89. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i1.426>
- World Bank. (2016). *Demographic change and development : a global typology*. World Bank Policy Research Working Paper, (7893).